

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN KOLABORATIF: SOLUSI EFEKTIF DALAM PENANGANAN KORUPSI DI ERA DIGITALISASI 5.0 DENGAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

Oleh:

Asyari¹, Harry Soeratin^{2,1}
email: asyari1881@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran informasi merupakan salah satu aspek yang menonjol era digitalisasi 5.0. Hal ini ditandai dengan penggunaan media sosial yang membuat masyarakat dapat dengan mudah menyebarkan dan mendapatkan berbagai informasi. Media tersebut ternyata kerap berperan dalam penanganan korupsi. Hal tersebut menjadi penting karena penanganan korupsi merupakan salah satu tantangan besar yang menghambat kemajuan dan pembangunan suatu negara. Untuk itu dibutuhkan metode yang efektif untuk memanfaatkan media sosial dalam penanganan korupsi. Salah satu metode tersebut adalah kepemimpinan transformasional dan kolaboratif. Artikel ini membahas tentang pola kepemimpinan tersebut, kemudian menganalisa bagaimana pola kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dapat efektif digunakan dalam penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0.

Kata Kunci: kepemimpinan transformasional, kepemimpinan kolaboratif, penanganan korupsi, era digitalisasi 5.0, media sosial.

ABSTRACT

Information spreading is a standout aspect of digitalization 5.0. It is indicated by the massive usage of social media by society. They can easily get and spread various information. Social media frequently take part in handling corruption. It has become important since corruption handling is one of the big challenges that obstruct advancement and development of a nation. Therefore, effective methods are needed to utilize social media in corruption handling. One of the methods is transformational and collaborative leadership. This article aims to explain the leadership methods, then analyze how transformational and collaborative leadership can be effectively applied in corruption handling of digitalization 5.0.

Keywords: *transformational leadership, collaborative leadership, handling corruption, digitalization 5.0, social media.*

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah yang serius di Indonesia selama beberapa dekade. Meskipun upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh negara ini dalam mengatasi masalah ini. Hal yang menjadi faktor latar belakang terkait tingginya korupsi di Indonesia antara lain:

- a. **Kultur Korupsi Lama:** Sejarah panjang Indonesia telah mencatat keberadaan kultur korupsi yang sudah tertanam di berbagai tingkatan masyarakat. Praktik korupsi telah menjadi biasa dan diterima sebagai bagian dari rutinitas dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik dan sektor bisnis. Praktik korupsi seperti suap, nepotisme, dan kolusi telah menjadi bagian dari pola perilaku yang meresap dalam berbagai lembaga, termasuk pemerintah, birokrasi, perusahaan, dan institusi sosial lainnya.
- b. **Ketidaksempurnaan Sistem Hukum:** Sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius, termasuk kurangnya independensi dan transparansi. Hal ini menyebabkan beberapa pelaku korupsi dapat menghindari pertanggungjawaban hukum atau menghadapi hukuman yang ringan. Beberapa pejabat publik yang terlibat dalam tindakan korupsi bahkan mungkin dilindungi oleh lingkungan yang korup dan bersifat kolusi, yang menghambat upaya pemberantasan korupsi yang efektif.
- c. **Tingkat Penghasilan Rendah bagi Pejabat Publik:** Gaji dan tunjangan yang rendah bagi pejabat publik sering kali dianggap sebagai faktor pendorong untuk melakukan korupsi. Penghasilan yang tidak memadai dapat mendorong praktik korupsi sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan mereka. Akibatnya, para pejabat mungkin mencari jalan pintas untuk memperoleh penghasilan lebih banyak dengan menggunakan kekuasaan mereka untuk menerima suap atau menyalahgunakan sumber daya publik.

- d. **Biaya Pemilihan dan Klientelisme:** Biaya tinggi dalam proses pemilihan politik di Indonesia menyebabkan kandidat politik harus mencari dana besar untuk kampanye mereka. Hal ini dapat menyebabkan keterlibatan kandidat dalam praktik korupsi untuk mendapatkan dana kampanye atau untuk membalas dukungan dari pendukung politiknya. Selain itu, dalam sistem politik yang didominasi oleh politik patronase dan klientelisme, pemenang pemilihan sering kali diharapkan untuk memberikan imbalan kepada pendukungnya dalam bentuk posisi jabatan atau keuntungan pribadi, yang dapat mendorong tindakan korupsi.
- e. **Birokrasi yang Rumit:** Birokrasi yang kompleks dan berbelit-belit di Indonesia menciptakan peluang bagi para pejabat untuk memanipulasi proses dan menerima suap sebagai imbalan atas jasa mereka. Selain itu, proses yang lambat dan berbelit-belit juga dapat menyebabkan praktik korupsi untuk mempercepat alur bisnis. Ketidakefisienan birokrasi dan tingkat korupsi yang tinggi dalam proses perizinan dan regulasi bisnis dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
- f. **Kurangnya Kesadaran dan Penegakan Etika:** Beberapa praktik korupsi mungkin dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak etis dalam masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sulit atau kurangnya kesadaran tentang dampak negatif dari tindakan korupsi. Selain itu, kurangnya penegakan etika dan integritas di kalangan pejabat publik dan swasta dapat menciptakan iklim di mana korupsi dapat berkembang subur.

Tingginya korupsi di Indonesia menyebabkan dampak negatif yang luas bagi pembangunan dan stabilitas sosial ekonomi. Korupsi dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi, merugikan pembangunan infrastruktur, menghambat investasi, memperkuat ketimpangan sosial, dan mengurangi kepercayaan publik

terhadap pemerintah dan lembaga publik. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah korupsi harus dilakukan dengan serius dan tegas, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penguatan sistem hukum, penegakan yang tegas, serta pengembangan budaya dan lingkungan yang berintegritas dan transparan. Hal ini sangat mungkin dilakukan pada era digitalisasi ini.

Era digitalisasi 5.0 memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu hal yang terlihat adalah bagaimana informasi dapat tersebar dengan sangat mudah. Kemudahan tersebut didukung oleh penggunaan media sosial yang masif di masyarakat. Fenomena tersebut membuka berbagai peluang baru dalam kehidupan, salah satunya dalam proses pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah yang telah menghambat kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang. Korupsi merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara, serta merugikan masyarakat secara keseluruhan. Untuk melakukan pemberantasan korupsi memanfaatkan media sosial tentu saja dibutuhkan sebuah metode yang efektif. Diantara banyak metode, kepemimpinan transformatif dan kolaboratif dianggap efektif untuk diterapkan menggunakan media sosial dalam proses pemberantasan korupsi.

Kepemimpinan transformasional dan kolaboratif memainkan peran penting dalam membentuk budaya anti-korupsi di masyarakat. Pemimpin yang transformasional dapat menginspirasi dan memotivasi bawahan serta melibatkan mereka dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Kepemimpinan kolaboratif mendorong kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga anti-korupsi, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan sinergi dalam penanganan korupsi. Kedua bentuk kepemimpinan tersebut, seharusnya dapat diaplikasikan menggunakan pola digitalisasi 5.0, terutama dalam penggunaan media sosial. Diharapkan penerapan keduanya pada media sosial akan memberikan hasil yang lebih masif dan luas.

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan anggota tim atau organisasi menuju pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Kepemimpinan melibatkan berbagai keterampilan, termasuk komunikasi efektif, kemampuan mengambil keputusan, empati, kepemimpinan moral, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan.

Pendapat Para Tokoh tentang Kepemimpinan:

1. Nelson Mandela: "Seorang pemimpin adalah seseorang yang tahu jalan, menunjuk jalan, dan berjalan di depan untuk memberikan contoh."
2. John C. Maxwell: "Kepemimpinan bukan tentang berada di depan atau di belakang. Ini tentang berada di tengah-tengah dan membawa orang-orang bersama-sama."
3. Stephen Covey: "Kepemimpinan adalah komunikasi hati ke hati. Jika kepemimpinan adalah hanya masalah kepala, maka kekayaan, kekuasaan, dan popularitas akan cukup."
4. Bill Gates: "Seorang pemimpin hebat tidak hanya mengarahkan orang lain ke tujuan tertentu, tetapi juga membantu mereka menemukan potensi terbaik mereka."
5. Margaret Thatcher: "Seorang pemimpin harus memiliki visi dan kemauan untuk mengejar visi tersebut dengan tekad yang kuat."

Pendapat dari para tokoh di atas menggambarkan bahwa kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, dan kemauan untuk menghadapi tantangan. Kepemimpinan bukan hanya tentang berada di posisi otoritas, tetapi lebih tentang mengambil tanggung jawab untuk membawa perubahan dan mengarahkan kelompok menuju keberhasilan.

Kepemimpinan adalah suatu konsep dan proses yang melibatkan interaksi antara seorang pemimpin dengan anggota kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin memiliki peran utama dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan memegang posisi formal atau otoritas, tetapi lebih tentang kemampuan untuk membawa perubahan positif dan menginspirasi orang lain untuk berkinerja lebih baik.

Seorang pemimpin dianggap berhasil ketika dia mampu menciptakan visi yang jelas dan inspiratif untuk masa depan, mengartikulasikan tujuan dan misi dengan jelas, dan memberikan arahan yang efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Visi pemimpin bertujuan untuk menciptakan gambaran masa depan yang menarik dan menggerakkan orang-orang untuk bergerak maju.

Kepemimpinan melibatkan banyak aspek, termasuk komunikasi yang efektif, kemampuan untuk mendengarkan dengan empati, dan kemampuan untuk memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan aspirasi dari anggota tim atau kelompok yang dipimpin. Pemimpin harus menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anggota timnya, mendorong

semangat kerja yang tinggi dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama.

Di dalam kepemimpinan, nilai-nilai etika dan integritas memainkan peran penting. Pemimpin harus berpegang pada prinsip-prinsip moral yang kuat, bertindak dengan kejujuran dan transparansi, serta menjadi contoh yang baik bagi anggota timnya. Kepemimpinan yang berbasis nilai akan menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan kepercayaan, dan ini akan mendukung kolaborasi dan produktivitas yang lebih baik di dalam organisasi.

Selain itu, kepemimpinan juga melibatkan kemampuan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana dalam berbagai situasi. Pemimpin harus mampu mengevaluasi informasi yang ada, mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan yang dibuat, dan membuat keputusan yang mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk mendelegasikan tugas dengan bijaksana. Seorang pemimpin yang efektif akan mengenali kekuatan dan kelemahan anggota timnya dan menempatkan mereka di posisi yang sesuai dengan keterampilan dan bakat mereka. Dengan cara ini, potensi penuh anggota tim dapat dimanfaatkan dan kinerja kelompok dapat ditingkatkan. Tidak ada pendekatan tunggal dalam kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Berbagai teori kepemimpinan, seperti kepemimpinan transformasional, transaksional, otoriter, partisipatif, dan sebagainya, menyajikan sudut pandang yang berbeda tentang cara-cara pemimpin dapat mempengaruhi dan memimpin kelompoknya. Pemimpin harus mampu mengadaptasi gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lingkungan di sekitarnya.

Secara keseluruhan, kepemimpinan adalah tentang memahami, menghargai, dan merangkul perbedaan individu dalam kelompok serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan potensi penuh dari anggota tim. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu menggerakkan orang lain untuk mencapai prestasi luar biasa dan mewujudkan visi bersama dalam mencapai keberhasilan organisasi dan masyarakat.

b. Teori Kepemimpinan

Teori Otoriter

Teori Otoriter Kepemimpinan adalah salah satu teori kepemimpinan yang menggambarkan pendekatan pemimpin yang sangat berkuasa dan otoriter dalam mengelola kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Dalam teori ini, pemimpin memiliki kontrol penuh atas pengambilan keputusan dan menentukan arah dan tindakan kelompok tanpa banyak keterlibatan atau partisipasi dari anggota tim.

Karakteristik utama dari kepemimpinan otoriter adalah adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kekuasaan dan pengaruh antara pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin otoriter cenderung mengambil keputusan secara mandiri, memerintah dengan tegas, dan memiliki sedikit toleransi terhadap kritik atau pertentangan.

Ciri-ciri dan Sifat Kepemimpinan Otoriter:

1. Pengambilan Keputusan Sentralisasi: Pemimpin otoriter cenderung memusatkan kekuasaan dan otoritas di tangan mereka sendiri. Mereka mengambil keputusan secara independen tanpa banyak konsultasi atau partisipasi dari anggota tim. Model pengambilan keputusan ini dapat menjadi efisien dalam situasi darurat atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat, tetapi bisa menjadi masalah

dalam jangka panjang karena dapat mengabaikan ide dan masukan yang berharga dari anggota tim.

2. **Komunikasi Satu Arah:** Pemimpin otoriter biasanya berkomunikasi dengan cara yang satu arah, di mana mereka menyampaikan arahan dan perintah kepada anggota tim tanpa banyak mendengarkan atau menerima umpan balik. Ini mengakibatkan kurangnya saluran komunikasi terbuka dan kolaborasi dalam organisasi.
3. **Kontrol Ketat:** Pemimpin otoriter cenderung mengendalikan hampir setiap aspek dari pekerjaan dan tugas anggota tim. Mereka mengawasi dan mengontrol setiap langkah, yang dapat menyebabkan rasa ketidakbebasan dan keengganan untuk mengambil inisiatif di kalangan anggota tim.
4. **Kurangnya Keterbukaan terhadap Inovasi:** Kepemimpinan otoriter seringkali kurang terbuka terhadap ide-ide baru atau inovasi dari anggota tim. Pemimpin cenderung lebih memilih kestabilan dan status quo, daripada menghadapi risiko perubahan.
5. **Kedisiplinan dan Ketaatan:** Di bawah kepemimpinan otoriter, kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan dan perintah diutamakan. Pemimpin mengharapkan anggota tim untuk taat dan patuh tanpa banyak pertanyaan atau tantangan.
6. **Pemecatan Mudah:** Pemimpin otoriter biasanya memiliki batas toleransi yang rendah terhadap kinerja rendah atau ketidakpatuhan, dan mereka dapat dengan cepat memecat anggota tim yang dianggap tidak memenuhi standar atau tidak mengikuti perintah.

Penerapan dan Dampak Kepemimpinan Otoriter:

Kepemimpinan otoriter dapat efektif dalam situasi-situasi yang memerlukan keputusan cepat dan tegas, seperti dalam situasi darurat atau situasi di mana kelompok membutuhkan bimbingan dan keputusan yang kuat. Namun, dalam jangka panjang, pendekatan kepemimpinan ini dapat memiliki dampak negatif pada organisasi dan anggota tim. Beberapa dampak negatif dari kepemimpinan otoriter termasuk:

1. Rendahnya Kepuasan Kerja: Anggota tim cenderung merasa kurang puas dengan pekerjaan mereka karena kurangnya otonomi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Kurangnya Kreativitas dan Inovasi: Kurangnya dukungan untuk ide-ide baru atau inovasi dapat menghambat kreativitas dan penemuan potensial di kalangan anggota tim.
3. Konflik dan Ketegangan: Penerapan kebijakan dan perintah yang tegas tanpa melibatkan anggota tim dapat menyebabkan ketegangan dan konflik di dalam organisasi.
4. Rendahnya Keterlibatan dan Motivasi: Kepemimpinan otoriter dapat mengurangi rasa keterlibatan dan motivasi anggota tim, karena kurangnya rasa memiliki dan kontrol atas pekerjaan mereka.

Sebagai alternatif, banyak organisasi saat ini beralih ke model kepemimpinan yang lebih partisipatif dan kolaboratif, di mana anggota tim memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan dalam berbagai aspek pekerjaan. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai kepemimpinan demokratis atau partisipatif, lebih mendorong kreativitas, keterlibatan, dan komitmen dari anggota tim. Namun, seperti dalam setiap konteks kepemimpinan, kesesuaian pendekatan bergantung pada situasi, budaya organisasi, dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Teori Gaya dan Perilaku

Teori Gaya dan Perilaku Kepemimpinan adalah pendekatan untuk memahami kepemimpinan yang berfokus pada karakteristik dan perilaku pemimpin dalam mengelola dan mempengaruhi anggota tim atau kelompok. Teori ini mengidentifikasi pola perilaku khusus pemimpin dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi hubungan antara pemimpin dan anggota tim serta kinerja organisasi.

Ada dua teori utama dalam kategori ini: Teori Gaya Kepemimpinan dan Teori Perilaku Kepemimpinan. Teori Gaya Kepemimpinan mencoba untuk mengklasifikasikan pemimpin berdasarkan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan dalam teori ini mencakup gaya otoriter, demokratis, dan laissez-faire (kebebasan penuh pada anggota). Adapun Teori Perilaku Kepemimpinan lebih berfokus pada perilaku konkret yang ditampilkan oleh pemimpin dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja dan kepuasan anggota tim. Terdapat dua pendekatan pada teori ini, yaitu perilaku berorientasi tugas (*task-oriented behavior*) dan perilaku berorientasi hubungan (*relationship-oriented behavior*).

Teori Gaya dan Perilaku Kepemimpinan mengakui bahwa gaya dan perilaku kepemimpinan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan tuntutan yang dihadapi oleh pemimpin. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana kepemimpinan dapat disesuaikan dengan situasi dan karakteristik anggota tim untuk mencapai efektivitas kepemimpinan yang optimal.

Teori Transformasional

Teori Transformasional Kepemimpinan mengacu pada pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada upaya pemimpin untuk mengilhami, memotivasi, dan mengubah anggota tim untuk mencapai tingkat kinerja

yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional menciptakan visi masa depan yang menarik, mempengaruhi dan memotivasi anggota tim untuk mencapainya, dan mendorong perkembangan pribadi dan profesional mereka. Teori ini menempatkan perhatian pada hubungan antara pemimpin dan pengikut, dan bagaimana pemimpin dapat menggerakkan perubahan positif dengan menciptakan iklim kerja yang inspiratif.

Kepemimpinan transformasional dikenal karena kemampuannya untuk menciptakan visi yang menarik dan mengilhami anggota tim untuk bekerja menuju tujuan bersama. Pemimpin transformasional juga berperan dalam membentuk budaya organisasi yang positif, mendorong kreativitas dan inovasi, serta meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan anggota tim.

Karakteristik utama dari kepemimpinan transformasional termasuk pemberdayaan anggota tim, komunikasi yang inspiratif, fokus pada pengembangan pribadi dan profesional, serta memberikan perhatian pada kebutuhan individu dalam mencapai potensi penuh mereka.

Teori Transformasional Kepemimpinan pertama kali diperkenalkan oleh James MacGregor Burns pada tahun 1978, dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bernard M. Bass. Teori ini telah menjadi salah satu pendekatan kepemimpinan yang paling banyak dipelajari dan diterapkan dalam berbagai konteks organisasi.

Teori Transaksional

Teori Transaksional Kepemimpinan adalah salah satu teori kepemimpinan yang telah dikembangkan oleh Bernard M. Bass pada tahun 1980-an. Teori ini mengidentifikasi hubungan antara pemimpin dan pengikut berdasarkan pertukaran atau transaksi antara keduanya. Dalam teori transaksional, pemimpin memberikan penghargaan atau hukuman

kepada pengikut berdasarkan kinerja dan pemenuhan tugas yang diharapkan.

Konsep utama dalam teori transaksional adalah adanya "kontrak psikologis" antara pemimpin dan pengikut. Kontrak ini mencakup ekspektasi, tanggung jawab, dan tujuan bersama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika pengikut mencapai target atau memenuhi tugas yang telah ditetapkan, mereka akan menerima penghargaan atau pengakuan dari pemimpin. Sebaliknya, jika pengikut tidak memenuhi tugas atau mencapai target, mereka dapat menerima hukuman atau umpan balik negatif dari pemimpin. Komponen Utama Teori Transaksional antara lain:

1. Penghargaan dan Hukuman: Pemimpin menggunakan penghargaan dan hukuman sebagai instrumen motivasi untuk mendorong kinerja yang diinginkan dari pengikut. Penghargaan dapat berupa pujian, promosi, tunjangan, atau bentuk insentif lainnya, sedangkan hukuman dapat berupa teguran, sanksi, atau peringatan.
2. Manajemen oleh Pengecualian (*Management by Exception*): Dalam teori transaksional, pemimpin biasanya mengintervensi atau memberikan perhatian ekstra hanya ketika ada perbedaan antara kinerja aktual dengan standar atau target yang telah ditetapkan. Pemimpin akan berfokus pada pengecualian dan intervensi ketika kinerja tidak sesuai dengan harapan.
3. Pemenuhan Harapan: Teori transaksional beroperasi dengan asumsi bahwa pengikut secara inheren memiliki keinginan untuk memenuhi tugas dan harapan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau organisasi. Pemimpin menggunakan penghargaan sebagai penguat positif untuk mendorong pemenuhan harapan tersebut.

4. Orientasi Tugas: Pemimpin transaksional cenderung memiliki orientasi tugas yang kuat, yang berarti mereka fokus pada penyelesaian tugas dan mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan utama adalah mencapai hasil yang diinginkan dan memastikan kinerja yang efisien dan efektif dari anggota tim.

Adapun Perbedaan dengan Teori Transformasional Kepemimpinan:

Salah satu perbedaan utama antara teori transaksional dan transformasional adalah pendekatan kepemimpinan yang berbeda. Di sisi satu, teori transaksional berfokus pada pertukaran dan penghargaan berdasarkan pemenuhan tugas, sementara di sisi lain, teori transformasional menekankan pada inspirasi, motivasi, dan pengaruh pemimpin untuk menciptakan perubahan positif dan visi yang menginspirasi.

Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin berupaya untuk menciptakan iklim kerja yang inspiratif, mendukung pengembangan pribadi dan profesional anggota tim, dan memberikan perhatian pada aspirasi individu. Pemimpin transformasional juga menciptakan perubahan organisasi dengan mendorong inovasi dan perkembangan kolektif.

Sementara teori transaksional berfokus pada "mengelola" pengikut melalui pertukaran penghargaan dan hukuman berdasarkan pemenuhan tugas, teori transformasional berusaha "mengubah" pengikut melalui inspirasi dan pemahaman visi bersama. Namun, penting untuk diingat bahwa teori-teori kepemimpinan tidak bersifat eksklusif, dan banyak pemimpin dapat menggabungkan elemen-elemen dari kedua teori ini untuk menciptakan pendekatan kepemimpinan yang efektif sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasi atau kelompok yang dipimpin.

METODE

Penelitian dalam pandangan soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan kontruksi dan analisis secara sistematis konsisten dan metodologis.² Sementara metode menjadi cara utama yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan dengan ketelitian ilmiah.³ Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan analisis data sekunder. Berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan artikel online digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang kepemimpinan transformasional dan kolaboratif, serta pemanfaatan media sosial dalam penanganan korupsi.

HASIL PEMBAHASAN

Metode penelitian yang digunakan berhasil menghimpun pengetahuan tentang kepemimpinan transformasional, kepemimpinan kolaboratif, dan pemanfaatan media sosial. Pemahaman yang mendalam pada ketiga hal tersebut diperlukan untuk menarik kesimpulan apakah pola kepemimpinan tersebut efektif dikolaborasikan dengan digitalisasi 5.0 dalam proses pemberantasan korupsi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dapat membentuk budaya organisasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional mampu mengubah paradigma dan nilai-nilai yang mendorong perilaku koruptif. Mereka juga dapat memobilisasi dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi. Pola Pemanfaatan media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas, memfasilitasi partisipasi masyarakat, dan memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap tindak korupsi.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42

³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 8

Berikut ini adalah analisa yang lebih mendalam tentang hubungan dari beberapa faktor tersebut.

Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu model kepemimpinan yang memperhatikan pengembangan individu dan organisasi. Kepemimpinan transformasional memfokuskan pada upaya untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi melalui perubahan paradigma dan budaya organisasi.

Pemimpin yang menerapkan konsep transformasional mampu mengubah perilaku dan pandangan para anggota organisasi melalui inspirasi, motivasi, dan pengarahan. Dalam konteks penanganan korupsi, kepemimpinan transformasional dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengubah perilaku dan pandangan para pelaku korupsi.

Inspirasi, motivasi, dan pengarahan tidak hanya terbatas pada penyampaian lisan. Ketiganya dapat diimplementasikan dalam bentuk lain, seperti tulisan, dokumentasi, dan rekaman jejak yang dapat dimuat dalam berbagai media. Pengemasan media yang bagus tentang kepemimpinan transformasional akan membuatnya mampu diterima oleh kalangan yang lebih luas. Tidak hanya anggota organisasi, tetapi dapat juga diterima oleh masyarakat luas. Hal tersebut harus didukung dengan proses penyebaran informasi yang luas dan masif. Media sosial dapat berperan untuk melaksanakan proses tersebut.

Kepemimpinan Kolaboratif

Kepemimpinan kolaboratif merupakan model kepemimpinan yang selaras dengan teori kepemimpinan transformasional yang memperhatikan kerjasama antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan kolaboratif mendorong terciptanya komunikasi yang baik antara para anggota organisasi dan meningkatkan keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan pola kepemimpinan kolaboratif, harus

mampu merangkul dan mengintegrasikan seluruh aspek yang ada di bawahnya, termasuk masyarakat yang dipimpinnya.

Masyarakat umum dapat berperan lebih dalam proses pemberantasan korupsi. Misalkan masyarakat dapat mengamati keadaan pejabat negara di sekitarnya, dan berani bersuara jika pejabat tersebut terindikasi melakukan korupsi. Selain itu, mereka juga dapat memberikan dukungan moril dan pengawasan lembaga penanggulangan korupsi, yang dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kritik dan saran.

Kolaborasi yang bagus antara pemerintah yang membuat regulasi untuk mempermudah proses pengaduan korupsi misalnya, ditambah aparat yang mempermudah proses pengaduan, dan masyarakat yang aktif mengawasi, akan menciptakan sebuah iklim pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Untuk melaksanakan proses tersebut, diperlukan penyampaian informasi yang efektif. Bagaimana pola kepemimpinan yang kolaboratif bisa disampaikan dan diterima, tidak hanya pada bagian organisasi pemerintah akan tetapi juga pada semua lapisan masyarakat. Sehingga proses kolaborasi penanganan korupsi dapat berjalan dengan baik.

Pemanfaatan Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu sarana pertukaran informasi yang luar biasa pada era digitalisasi 5.0. Disini masyarakat dapat bertukar informasi dengan mudah. Mulai dari menyebarkan informasi baru, hingga menyebarkan ulang informasi yang sudah ada.

Secara mengejutkan, masyarakat mulai aktif melakukan proses pemberantasan korupsi menggunakan sarana tersebut. Berbagai langkah telah diambil masyarakat di media sosial. Mulai dari melakukan kritik secara langsung terhadap pemerintah daerah yang diduga kuat melakukan korupsi, hingga membeberkan bukti nyata kekayaan pejabat negara yang tidak wajar. Hal tersebut muncul dari spontanitas individu pengguna media sosial. Mereka yang kebetulan mempunyai

info dan berani mengutarakan pendapat akan dengan mudah berpartisipasi dalam proses pemberantasan korupsi melalui media sosial.

Tak jarang masyarakat juga memanfaatkan media sosial untuk memberikan dukungan terhadap proses penanganan korupsi. Animo positif masyarakat tentu saja akan memperkuat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Pergerakan yang sudah cukup masif tersebut harus didukung dengan sebuah sistem yang efektif. Misalkan pemerintah yang bersih dan menunjukkan keberpihakannya pada proses penanganan korupsi di media sosial, akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan tersebut.

Hal-hal paling sederhana misalnya, dengan menyebarkan ulang informasi dari pemerintah tentang penanganan korupsi. Kelompok yang tadinya tidak memiliki informasi tentang penanganan korupsi untuk disampaikan, akan dengan mudahnya menyebarkan informasi yang sebelumnya sudah dibuat oleh pemerintah. Secara tidak langsung, euforia penanganan korupsi akan berlangsung lebih lama.

Pemanfaatan Media Sosial sebagai Upaya Memberantas Korupsi

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat merusak sistem pemerintahan, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya untuk memerangi korupsi, pemanfaatan media sosial telah menjadi semakin penting dan efektif. Era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberantas korupsi melalui media sosial. Hal yang sangat mungkin dilakukan pada era digitalisasi ini antara lain:

Transparansi dan Akuntabilitas:

Salah satu kekuatan media sosial adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi secara luas dan cepat. Melalui platform ini, organisasi pemerintah dan

non-pemerintah dapat dengan mudah mempublikasikan laporan keuangan, proyek, dan kegiatan yang terkait dengan pencegahan korupsi. Informasi yang terbuka dan mudah diakses ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang. Masyarakat dapat dengan mudah memantau penggunaan dana publik dan mengidentifikasi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan.

Pelaporan Korupsi:

Media sosial juga menyediakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi secara cepat dan mudah. Dengan meluncurkan kampanye berbasis media sosial, organisasi anti-korupsi dapat menyuarakan pentingnya melaporkan tindakan korupsi serta mengarahkan masyarakat untuk menggunakan mekanisme pelaporan yang tepat. Melalui kanal media sosial ini, laporan korupsi dapat dikirimkan langsung ke lembaga anti-korupsi atau media yang dapat menyelidiki lebih lanjut. Kemudahan ini memungkinkan lebih banyak laporan masuk dan membantu dalam mengidentifikasi dan menangani lebih banyak kasus korupsi.

Kampanye Edukasi dan Kesadaran:

Media sosial adalah alat yang efektif untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari korupsi. Kampanye online dapat menyebarkan informasi tentang bagaimana korupsi merugikan masyarakat, menghambat pembangunan, menghambat investasi, dan mengurangi kualitas layanan publik. Melalui kampanye edukasi ini, kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dapat ditingkatkan. Selain itu, kampanye ini juga dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

Mobilisasi Massa untuk Aksi:

Media sosial memungkinkan untuk memobilisasi massa secara cepat dan efisien. Kampanye online dapat dengan mudah mengumpulkan tanda tangan petisi atau mengorganisir demonstrasi damai sebagai bentuk tekanan terhadap

praktik korupsi. Aktivisme online ini dapat menciptakan tekanan sosial yang signifikan dan mempengaruhi perubahan perilaku di kalangan pihak berwenang. Pengaruh massa dapat menjadi kekuatan pendorong bagi lembaga pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas dalam memberantas korupsi.

Memonitor Kinerja Publik:

Media sosial memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pejabat publik dan lembaga pemerintah dengan lebih cermat. Tanggapan masyarakat terhadap ketidakpatuhan atau tindakan korupsi dapat diunggah secara terbuka untuk menimbulkan tekanan bagi pihak berwenang agar bertindak lebih efektif dan bertanggung jawab. Masyarakat sebagai pengawas aktif dapat membantu mengurangi praktik korupsi dengan mengungkapkan pelanggaran atau ketidakpatuhan yang mencurigakan.

Melibatkan Generasi Muda:

Generasi muda, yang akrab dengan teknologi dan media sosial, dapat menjadi agen perubahan dalam memberantas korupsi. Kampanye melalui media sosial yang menyasar generasi muda dapat menciptakan kesadaran dan membentuk nilai-nilai integritas serta etika yang kuat untuk masa depan. Mereka dapat menjadi suara yang kuat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan dan pelayanan publik.

Meskipun pemanfaatan media sosial memiliki potensi besar dalam memberantas korupsi, perlu diingat bahwa informasi yang beredar di media sosial harus dielaborasi dan diverifikasi untuk memastikan akurasi dan kebenarannya. Selain itu, perlu ada kerja sama yang kuat antara pihak berwenang, lembaga anti-korupsi, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menciptakan upaya terkoordinasi dan komprehensif dalam memerangi korupsi melalui media sosial.

Sinergi Kepemimpinan Transformasional Dan Kolaboratif Dengan Pemanfaatan Media Sosial

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa antara pola kepemimpinan transformatif dan kolaboratif serta pemanfaatan media sosial memiliki kaitan yang erat. Masing-masing dapat saling menguatkan.

Kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dapat diintegrasikan dengan pemanfaatan media sosial dalam upaya menangani korupsi di era digitalisasi 5.0. Media sosial khususnya, memiliki peran penting dalam menghubungkan pola kepemimpinan yang diterapkan agar sampai dan diterima oleh masyarakat. Selain itu pergerakan masyarakat yang sebelumnya masih bersifat individual dapat lebih terarah oleh pola kepemimpinan tersebut.

Pemimpin yang menerapkan kepemimpinan transformasional dapat memotivasi dan menginspirasi masyarakat melalui media sosial untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Pada awalnya, masyarakat yang terinspirasi bisa mulai menerapkan prinsip anti korupsi dalam kehidupan mereka masing-masing. Dilanjutkan dengan gerakan yang lebih masif, seperti pengawasan terhadap praktik korupsi oleh pejabat terdekat.

Kepemimpinan kolaboratif dapat memfasilitasi terciptanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait dalam menangani korupsi dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi. Pemerintah dan lembaga penanganan korupsi dapat menyediakan fasilitas pengaduan yang mudah diakses menggunakan media sosial.

Selain itu, pemanfaatan media sosial juga dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan dan pelaporan praktik korupsi. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi, mengungkap praktik korupsi, serta memberikan dukungan terhadap upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Dengan demikian, sinergi antara kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dengan pemanfaatan media sosial dapat menjadi solusi efektif dalam penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0.

Sinergi antara kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dengan pemanfaatan media sosial menciptakan kombinasi yang kuat dan bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi serta mendorong perubahan positif. Mari kita perdalam analisis tentang sinergi ini dan keuntungannya secara lebih mendalam:

a. Menggalang Dukungan Luas:

Melalui media sosial, kepemimpinan transformasional dapat menyebarkan visi yang inspiratif dan tujuan organisasi dengan lebih luas dan cepat. Dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau LinkedIn, pesan dan informasi organisasi dapat mencapai audiens yang lebih besar dan beragam, termasuk anggota tim, karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemimpin dapat menggunakan konten yang kreatif dan menarik seperti video, infografis, atau cerita yang memikat untuk menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Dukungan yang luas dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan membantu menciptakan momentum dan energi positif dalam mencapai tujuan bersama.

b. Meningkatkan Keterlibatan Anggota Tim:

Pemanfaatan media sosial memberikan kesempatan bagi kepemimpinan kolaboratif untuk meningkatkan keterlibatan anggota tim. Platform media sosial menyediakan saluran komunikasi dua arah yang memungkinkan anggota tim untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau berbagi ide. Pemimpin yang membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi dan kekhawatiran anggota tim menunjukkan rasa menghargai dan mengakui kontribusi mereka. Keterlibatan ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap tujuan dan tugas organisasi, memotivasi anggota tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif.

c. Memfasilitasi Kolaborasi:

Media sosial menjadi alat yang efisien untuk memfasilitasi kolaborasi di antara anggota tim, terutama jika anggota tim berada di lokasi yang berbeda secara geografis. Fitur-fitur media sosial seperti grup diskusi, ruang kerja virtual, atau platform kolaborasi dapat digunakan untuk berbagi ide, berkoordinasi, dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan atau mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang efektif di media sosial mengurangi hambatan komunikasi, mempercepat pertukaran informasi, dan memperkuat rasa kebersamaan anggota tim.

d. Memperkuat Jaringan dan Kemitraan:

Media sosial tidak hanya memfasilitasi kolaborasi di dalam organisasi, tetapi juga dapat memperkuat jaringan dan kemitraan dengan lembaga lain, komunitas, atau sektor swasta. Dengan pemanfaatan media sosial, organisasi dapat berinteraksi dengan mitra potensial, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, atau berbagi informasi dengan organisasi sejenis. Sinergi antara kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dengan media sosial dapat membuka pintu bagi peluang kerjasama yang saling menguntungkan dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan organisasi.

e. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

Pemanfaatan media sosial dalam kepemimpinan transformasional dan kolaboratif membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Media sosial menjadi platform untuk mempublikasikan laporan keuangan, kegiatan organisasi, atau progres proyek dengan mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan informasi terbuka yang tersedia, organisasi harus bertanggung jawab atas penggunaan dana dan

keputusan yang mereka buat. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas organisasi di mata masyarakat.

f. Mempertegas Peran Pemimpin:

Kepemimpinan transformasional dan kolaboratif yang terintegrasi dengan media sosial dapat memperkuat peran pemimpin. Melalui media sosial, pemimpin dapat menjadi contoh dan menginspirasi anggota tim dan masyarakat secara lebih luas. Penggunaan media sosial dengan bijaksana untuk berbagi wawasan, pemikiran, dan kisah sukses dapat membantu membangun citra pemimpin yang kuat, meyakinkan, dan mempengaruhi pemikiran orang lain.

Kombinasi sinergi ini menciptakan lingkungan yang terbuka, inklusif, dan inovatif. Ini memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif, meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja anggota tim, serta menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Namun, penting untuk diingat bahwa pemanfaatan media sosial haruslah didasarkan pada etika dan tanggung jawab, serta dukungan penuh dari para pemimpin dan anggota tim untuk memastikan kesuksesan implementasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa terhadap data-data yang dikumpulkan, kepemimpinan transformasional dan kolaboratif, bersama dengan pemanfaatan media sosial, dapat menjadi solusi efektif dalam penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0.

Implementasi strategi tersebut memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Upaya ini harus didukung oleh regulasi yang memadai, pendidikan anti-korupsi yang menyeluruh, dan kesadaran masyarakat yang tinggi akan bahaya korupsi.

Dengan demikian, negara dapat memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan korupsi yang efektif, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warganya di era digitalisasi 5.0.

Kepemimpinan transformasional dan kolaboratif merupakan solusi efektif dalam penanganan korupsi di era digitalisasi 5.0. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan korupsi.

Sinergi antara kepemimpinan transformasional dan kolaboratif dengan pemanfaatan media sosial mampu mengubah perilaku dan pandangan para pelaku korupsi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan korupsi. Dalam rangka mengatasi korupsi di era digitalisasi 5.0, penting bagi para pemimpin dan pemerintah untuk memanfaatkan potensi kepemimpinan transformasional dan kolaboratif, serta media sosial sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.